



MAN 1 Tanah Datar
Plus Keterampilan

MADRASAH *Maju*
BERMUTU MENDUNIA



LAPORAN

KEUANGAN AUDITED TAHUN ANGGARAN

2025

MAN 1 Tanah Datar Plus Keterampilan

Disusun Oleh

Dr. Rika Maria, MA

198107072005012005

Email:

rikamaria0707@gmail.com



Jln. Sawah Parit, Sungayang,
Tanah Datar



<https://man1tanahdatar.sch.id>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 TANAH DATAR

Jalan Sawah Parit Balai Diateh Sungayang Kab. Tanah Datar Kode Pos 27294
Telepon 0752- 71982 Email.mansungayangbatusangkar@kemenag.go.id
Website : www.man1batusangkar.sch.id

Sungayang, 05 Mei 2026

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Bukittinggi
Jalan Prof. Hazairin No 1 Bukit Cangang Kayu Ramang
Bukittinggi, 26138

SURAT PENGANTAR

NOMOR: ~~393~~ /Ma.03.4.1/KU.01.1/07/2026

No	Naskah Dinas/ Barang	Banyaknya	Keterangan
1	Dengan hormat, bersama ini kami kirimkan Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2025 dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar, sebagaimana terlampir	1 (berkas)	Demikian surat ini kami sampaikan dan terima kasih.

Diterima tanggal.....

Penerima,

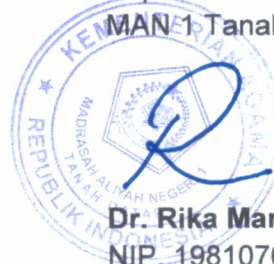
.....

.....

Pengirim,

Kepala

MAN 1 Tanah Datar



Dr. Rika Maria, MA

NIP. 19810707 200501 2 005

KATA PENGANTAR



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Sumatera Barat (299847) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Sumatera Barat (299847)** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor S-208/PB/2025 Tahun 2025 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada **Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Sumatera Barat (299847)**. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Batusangkar, 31 Desember 2025
Kepala MAN 1 Tanah Datar

Dr. Rika Maria, MA
NIP. 19810707 200501 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 TANAH DATAR**

Jl. Sawah Parit Sungayang Kab. Tanah Datar (0752) 71982 Kode Pos 27294

Email: mansungayangbatusanngkar@kemenag.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan **Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Sumatera Barat (299847)** Audited Tahun 2025 selaku UAKPA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Aaudited Tahun 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batusangkar, 31 Desember 2025
Kepala MAN 1 Tanah Datar

Dr. Rika Maria, MA
NIP. 19810707 200501 2 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata	
Pengantar	
Daftar Isi	
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	1
III. Laporan Operasional	2
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	2
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	

Laporan Keuangan MAN 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (299847) Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor S-208/PB/2025 Tahun 2025 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode **31 Desember 2025**.

Realisasi Pendapatan Negara pada periode Audited TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp 0,-** atau mencapai **0,00** persen dari anggaran Pendapatan-LRA sebesar **Rp 0,-**.

Realisasi Belanja Negara pada **31 Desember 2025** adalah sebesar **Rp 664.212.703,-** atau mencapai **99** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 671.718.000,-**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada **31 Desember 2025**

Nilai Aset per **31 Desember 2025** dicatat dan disajikan sebesar **Rp 3.072.326.376,-** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp 343.000,-**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp 3.071.983.376,-**; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar **Rp 0,00**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp 0,00**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp 3.072.326.376,-** dan **Rp 3.072.326.376,-**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan ,-. surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan **31 Desember 2025** adalah sebesar **Rp 0,-**, sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp 759.329.928,-** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **(Rp 759.329.928,-)**. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp0,-** dan **Rp 0,-** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **(Rp 755.909.928)**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan Audited Tahun 2025 sebelumnya. Ekuitas pada tanggal **31 Desember 2025** adalah sebesar **Rp 2.742.222.301,-** dikurangi Defisit-LO sebesar **(Rp 755.909.928,-)** kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai **Rp (25.221.300,-)** **Koreksi atas Reklafikasi Rp. 30.897.300 dan koreksi nilai aset Non Revaluasi (5.676.000)** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal **31 Desember 2025** adalah senilai **Rp 3.072.326.376,-**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal **31 Desember 2025** disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk **31 Desember 2025** disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 TANAH DATAR
KAB. TANAH DATAR PROV. SUMATERA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025		% thd Angg	31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0,00	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	572.718.000	565.212.703	98,69	588.794.200
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		572.718.000	565.212.703	98,69	588.794.200
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	99.000.000	99.000.000	100,00	61.320.000
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	0,00	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	0,00	-
Belanja Modal Lainnya	B.10	-	-	#DIV/0!	-
Jumlah Belanja Modal		99.000.000	99.000.000	100,00	61.320.000
JUMLAH BELANJA		671.718.000	664.212.703	98,88	650.114.200

II. NERACA

**MAN 1 TANAH DATAR KAB. TANAH DATAR PROV. SUMATERA BARAT
NERACA (AUDITED)
PER 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	343.000	440.000
Persediaan Yang Belum Diregister			
Jumlah Aset Lancar		343.000	440.000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	651.983.000	251.983.000
Peralatan dan Mesin	C.14	973.205.475	945.145.975
Peralatan dan Mesin Belum Diregister		-	-
Gedung dan Bangunan	C.15	3.067.217.000	3.067.217.000
Gedung dan Bangunan Belum Diregister			
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belum Diregister			
Aset Tetap Lainnya	C.17	417.621.000	382.621.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(2.038.043.099)	(1.905.184.674)
Jumlah Aset Tetap		3.071.983.376	2.741.782.301
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	-	-
Aset Lainnya Yang Belum Diregister			
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	C.22	-	-
Aset Lainnya			
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		3.072.326.376	2.742.222.301
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.25	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.26	3.072.326.376	3.254.563.423
JUMLAH EKUITAS DANA		3.072.326.376	2.742.222.301

III. LAPORAN OPERASIONAL

**MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 TANAH DATAR
KAB. TANAH DATAR PROV. SUMATERA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	50.529.300	37.505.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	412.502.703	437.671.700
Beban Pemeliharaan	D.5	127.065.000	115.355.000
Beban Perjalanan Dinas	D.6	6.110.000	11.832.500
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	163.122.925	175.116.638
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		759.329.928	777.480.838
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(759.329.928)	(777.480.838)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(755.909.928)	(777.480.838)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBP	D.13	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(755.909.928)	(777.480.838)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 TANAH DATAR
KAB. TANAH DATAR PROV. SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 dan 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	2.742.222.301	2.869.588.939
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(755.909.928)	(777.480.838)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Penyesuaian Nilai Kewajiban		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.5	-	-
LAIN-LAIN	E.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		1.060.792.703	650.114.200
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		330.104.075	(127.366.638)
EKUITAS AKHIR	E.7	3.072.326.376	2.742.222.301

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 TANAH DATAR
KAB. TANAH DATAR PROV. SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 dan 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	2.742.222.301	2.869.588.939
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(755.909.928)	(777.480.838)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Penyesuaian Nilai Kewajiban		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.5	-	-
LAIN-LAIN	E.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		1.060.792.703	650.114.200
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		330.104.075	(127.366.638)
EKUITAS AKHIR	E.7	3.072.326.376	2.742.222.301

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis MAN 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat

Dasar Hukum
Entitas dan

Rencana
Strategis

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (299847) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Jawah Parit Sungayang Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (299847) mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, **Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (299847)** berkomitmen dengan visi *“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel, dan transparan melalui melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”* Untuk mewujudkannya akan dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif kementerian negara/lembaga dalam pemanfaatan

informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.

- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Audited Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh **Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (299847)** Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (299847) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan **Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (299847)** dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian **Laporan Keuangan Audited Tahun 2025** telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan **Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (299847)** adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkan surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1 Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2 Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya.

Aset Tetap**b.Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jamn, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak se suai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain - Lain pada pos Aset Lainnya .
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas se suai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/ BMD .

Penyusutan

Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai

atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara asset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual Pertama
Kali****(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh

pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2025 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2016 adalah merupakan implementasi yang pertama.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, **Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (299847)** telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	31-Dec-25	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	572.718.000	590.718.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	99.000.000	61.500.000
Jumlah Belanja	671.718.000	652.218.000

Realisasi
Pendapatan
Rp 0,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada **31 Desember 2025** adalah sebesar **Rp 0,-** atau mencapai **00.00** persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp. 0**. Pendapatan **Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (299847)** terdiri dari Penerimaan Negara Bukan pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan bukan pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara

Rp

664.212.703,-

Realisasi Belanja instansi pada **31 Desember 2025** adalah sebesar **Rp 664.212.703,-** atau 99,68 % dari anggaran belanja sebesar **Rp 671.718.000,-** Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	572.718.000	565.212.703	98,69
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	99.000.000	99.000.000	100,00
Total Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	671.718.000	664.212.703	98,88

Perbandingan Realisasi Belanja

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	565.212.703	588.794.200	4,01
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	99.000.000	61.320.000	(61,45)
Jumlah	664.212.703	650.114.200	(2,17)

Realisasi Belanja

B.3 Belanja Pegawai

Pegawai Rp 0,-

Realisasi Belanja Pegawai **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2025** adalah masing-masing sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 0,-** Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai

Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0
Belanja Gaji dan Tunjangan Khusus	0	0
Belanja Honorarium	0	0
Belanja Lembur	-	-
Belanja Vakasi	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-
Jumlah Belanja	0	0

Belanja

Barang Rp.

565.212.703,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar **Rp. 565.212.703,-** dan **Rp. 588.794.200,-**

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	355.794.683	378.144.541	5,91
Belanja Barang Non Operasional	0	0	-
Belanja Jasa	56.708.020	46.207.159	(22,73)
Belanja Peneliharaan	126.600.000	114.610.000	(10,46)
Belanja Pejalaran Dalam Negeri	6.110.000	11.832.500	48,36
Belanja Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-
Belanja Barang Persediaan	20.000.000	38.000.000	47,37
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja	3.420.000	-	-
Jumlah Belanja	565.212.703	588.794.200	4,01

**Belanja
Modal Rp.
99.000.000.-**

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar **Rp. 99.000.000.-** dan **Rp. 61.320.000,-**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 30 September 2025	REALISASI 30 September 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.000.000	36.320.000	(76,21)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	35.000.000	25.000.000	(40,00)
Jumlah Belanja Kotor	99.000.000	61.320.000	(61,45)
Pengembalian	-	-	0,00
Jumlah Belanja	99.000.000	61.320.000	(61,45)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp. 0- dan Rp. 0.-

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	ASI 30 Septemb	REALISASI 30 September 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin **31 Desember 2025** adalah sebesar **Rp. 99.000.000.-**,.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar **Rp. 0.-** dan **Rp. 0.-**.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 September 2025	Realisasi 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
RKB	0	0	0,0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp. 0.- dan Rp. 0.-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**.

**Belanja
Bantuan
Sosial Rp.0,-**

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**. Belanja bantuan sosial merupakan Bantuan Siswa Miskin yang diberikan kepada siswa miskin untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk Uang.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial***31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
BSM	0	0	0,00
	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar **Rp 0,00,-** dan **Rp. 0,00,-**. Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Adapun Kas pada Bendahara Pengeluaran **Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Prov. Sumateta Barat (299847)** sudah dipertanggung jawabkan semuanya pada akhir tanggal pelaporan.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rekening Bank	0	0
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	19.500.000	0

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar **Rp 0,00** dan **Rp0,00**. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal **31 Desember 2025** sebesar **Rp0,00** dan **31 Desember 2024** sebesar **Rp0,00**

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	30-Sep-25	30 September 2024
Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	0	
Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas	0	

Piutang Bukan Pajak Rp,00 **C.4 Piutang PNPB**

Saldo Piutang Bukan Pajak **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar **Rp,00** dan **Rp,00**. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

**Perbandingan Rincian Piutang PNBP 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024**

Uraian	31-Dec-25	31/12/2024
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

**Bag Lancar
TP/TGR
Rp0,00**

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar **Rp0,00.** dan **Rp0,00.**

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

**Bag Lancar
TPA Rp0,00**

**C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan
Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00.** Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo

dalam 12 bulan atau kurang.

**Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar
Rp0,00**

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan.

**Beban Dibayar
di Muka
Rp0,00**

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

**Pendapatan
Yang Masih
Harus
Diterima
Rp0,00**

C.9 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Persediaan

**Rp.
343.000,00**

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar **Rp. 343.000,-** dan **Rp. 440.000,-**.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024**

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	343.000	440.000
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Persediaan Yang Belum Diregister	0	0
Jumlah Persediaan	343.000	440.000

Rincian Persediaan berdasarkan kanwil disajikan pada lampiran.

Tagihan

TP/TGR Rp0,00

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada

bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

TPA Rp0,00

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

**Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0,00**

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

**Tanah Rp
651.983.000,0
0,-**

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup **Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar**

Prov. Sumateta Barat (299847) 31 Desember 2025 dan **31 Desember 2024** adalah sebesar **Rp 651.983.000,00** dan **Rp 251.983.000,00**. Ada penambahan aset tanah berupa hibah dari komite dengan nilai Rp. 400.000.000,-. Semua aset tanah dicatat sebagai aset **Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Prov. Sumateta Barat (299847)**.

Peralatan dan Mesin Rp 973.205.475,-
Peralatan dan Mesin Belum diregister Rp. 0,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar **Rp 973.205.475,-**, Peralatan dan Mesin Belum diregister **Rp. 0,-** dan **Rp 945.145.975,-**. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Rp 3.067.217.000,00,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah **Rp.3.067.217.000,00** dan **Rp 3.067.217.000,-**. Nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan di lingkup **Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Prov. Sumateta Barat (299847) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah sebesar **Rp 3.067.217.000,-** adalah sebesar **Rp 3.067.217.000,-**. Semua aset tanah dicatat sebagai aset

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Prov. Sumateta Barat (299847).

**Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp0,00**

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** masing-masing adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Aset Tetap Lainnya Rp 417.621.000,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah **Rp 417.621.000,-** dan **Rp 382.621.000,-**.

Saldo per 31 Desember 2024	382.621.000
Mutasi tambah:	35.000.000
Penambahan Aset Tetap Lainnya	35.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	-
Saldo per 31 Desember 2025	417.621.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	417.621.000

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp 00,--

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00,-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp 2.038.043.099,-)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing Rp **(2.038.043.099,-)** dan Rp **(1.905.184.674,-)**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per **31 Desember 2025**, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	973.205.475	(893.773.415)	1.866.978.890
2	Gedung dan Bangunan	3.067.217.000	(1.144.269.684)	4.211.486.684
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	417.621.000	-	417.621.000
Akumulasi Penyusutan		4.458.043.475	(2.038.043.099)	6.496.086.574

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada

lampiran.

**Aset Tak Berwujud
Rp0,00**

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) **31 Desember 2025** adalah sebesar **Rp0,00** dan **31 Desember 2024** berjumlah **Rp0,00**. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

**Aset Lain-Lain
Rp. 0,00**

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Deputy Administrasi BAPK serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 30 September 2025	
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	
Mutasi kurang :	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
Penghapusan BMN	
Saldo per 31 Desember 2025	
Amortisasi s.d 31 Desember 2025	
Nilai Buku per 31 Desember 2025	

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (Rp.00)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp 0,-**. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	-	-	-
2	ATB Lainnya	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
B	Aset Lainnya	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
	Total	-	-	-

Uang Muka dari KPPN Rp 0,00,-

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN **31 Desember 2025** sebesar **Rp 0,00,-** dan **31 Desember 2024** berjumlah **Rp 0,00,-**. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 0,-

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** masing-masing sebesar **Rp0.00** dan **Rp 0,-**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang

masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Pendapatan yang ditangguhkan Rp 0,00

C.26 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Nilai pendapatan ditangguhkan **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Pendapatan yang ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal Pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal **31 Desember 2025** .

Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan pada **Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Prov. Sumatera Barat (299847)** pertanggal pelaporan disajikan sebagai berikut

Uraian	Jumlah
Pendapatan PNBPN	-
PPn yang belum disetor	-
Total	-

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0,00

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka **31 Desember 2025** sebesar **Rp0,00** dan **31 Desember 2024** adalah berjumlah **Rp0,00**. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN.

**Beban Yang
MAsih Harus
Dibayar
Rp.0,00**

C.28 Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar **31 Desember 2025** dan **31 Desember 2024** sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00** merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
Tahun Desember 2025 dan Desember 2024*

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-

**Ekuitas Rp
3.072.326.376,-**

C.29 Ekuitas

Ekuitas 31 Desember **2025** adalah sebesar **Rp 3.072.326.376,-** dan **31 Desember 2024** adalah berjumlah **Rp. 2.742.222.301,-**. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBPNP Rp 0,- D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	NAIK (TURUN %)
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Lain-lain-LO merupakan pengembalian beban pegawai Kelebihan Uang Persediaan.

Beban Pegawai Rp 0,- D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan Rp.50.529.300,- D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 50.529.300,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil

produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban**Barang dan****Jasa Rp****412.502.70****3,-****D.4 Beban Barang dan Jasa**

Beban Jasa **31 Desember 2025** adalah **Rp 412.502.703,-** Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban**Pemeliharaan
an Rp****127.065.00****0,-****D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan **31 Desember 2025** adalah masing-masing sebesar **Rp. 127.065.000,-** Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban**Perjalanan****Dinas Rp****6.110.000,-****D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas **31 Desember 2025** adalah sebesar **Rp 6.110.000,-**. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban**Barang****untuk****Diserahkan****kepada****Masyarakat****Rp 0,00****D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat **31 Desember 2025** adalah sebesar **Rp0,00**. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Beban Bantuan Sosial Rp 0,-	D.8 Beban Bantuan Sosial <p>Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 00,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.</p>
Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 163.122.925,-	D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi <p>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 163.122.925,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.</p>
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,00	D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih <p>Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.</p>
Beban Lain-lain Rp0,00	D.11 Beban Lain-lain <p>Jumlah Beban Lain-lain untuk 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.</p>

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional **D.12 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional****3.420.000,-****3.420.000,-**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional **31 Desember 2025** adalah sebesar **Rp 3.420.000,-**.

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa **D.13 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa****Rp0,00****Rp0,00**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp 2.742.222.301,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar **Rp 2.742.222.301,- dan Rp. 2.869.588.939,-**

Defisit LO

E.2 Surplus (Defisit) LO

Rp (755.909.928,-)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah sebesar **Rp (755.909.928,- dan Rp (777.480.838,-)**. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar **Rp0,00 dan Rp0,00**. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk **31 Desember 2025** adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

**Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi Rp
5.676.000,-**

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar **Rp 5.676.000,00-**, dan **Rp 0,00-**.

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap 31 Desember 2025

Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah Koreksi Tambah	-
Koreksi Kurang	-
Gedung dan Bangunan	-
Aset Tetap Lainnya	-
Jumlah Koreksi Kurang	-
Jumlah	-

**Koreksi atas
Reklasifikasi
Rp.
(755.909.928,-),-**

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas yang menambah/mengurangi Ekuitas yang antara lain beral dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan Mendasar. Koreksi atas Reklasifikasi untuk **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar **Rp.30.897.300** dan **Rp. 0**

Rincian untuk **31 Desember 2025** adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Reklasifikasi	Jumlah Koreksi
Reklasifikasi	30.897.300
Jumlah	30.897.300

Koreksi Atas Pendapatan Rp0,00

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp,00**. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Pendapatan	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	-
Pendapatan Lainnya	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain – Hibah Masuk/Keluar Rp0,00

E.7 Koreksi Hibah Masuk/Keluar

Koreksi Nilai Hibah Masuk/Keluar merupakan pencatatan atas hibah masuk/keluar berupa hibah barang. Koreksi pencatatan hibah masuk/keluar untuk

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

Ekuitas Akhir**Rp3.072.326.37****6,-****E.8 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas **31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024** adalah masing-masing sebesar **Rp Rp3.072.326.376,-** dan **Rp 2.742.222.301,-**

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL
NERACA**

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca pada MAN 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Sumatera Barat (299847).

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak terdapat pengungkapan lain-lain pada MAN 1 Tanah Datar Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (299847).

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (299847) MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 TANAH DATAR

Tgl Data : 04/05/26 1:43 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 3:36 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	50,529,300	37,505,000	13,024,300	34.727
Beban Barang dan Jasa	412,502,703	437,671,700	(25,168,997)	(5.751)
Beban Pemeliharaan	127,065,000	115,355,000	11,710,000	10.151
Beban Perjalanan Dinas	6,110,000	11,832,500	(5,722,500)	(48.363)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (299847) MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 TANAH DATAR

Tgl Data : 04/05/26 1:43 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 3:36 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	163,122,925	175,116,638	(11,993,713)	(6.849)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	759,329,928	777,480,838	(18,150,910)	(2.335)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(759,329,928)	(777,480,838)	18,150,910	(2.335)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,420,000	0	3,420,000	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,420,000	0	3,420,000	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3,420,000	0	3,420,000	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(755,909,928)	(777,480,838)	21,570,910	(2.774)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(755,909,928)	(777,480,838)	21,570,910	(2.774)

Keterangan :

FINAL

SUNGAYANG, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RIKA MARIA
198107072005012005

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (299847) MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 TANAH DATAR

Tgl Data : 04/05/26 1:43 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 3:36 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	343,000	440,000	(97,000)	(22.05)
JUMLAH ASET LANCAR	343,000	440,000	(97,000)	(22.05)
ASET TETAP				
Tanah	651,983,000	251,983,000	400,000,000	158.74
Peralatan dan Mesin	973,205,475	945,145,975	28,059,500	2.97
Gedung dan Bangunan	3,067,217,000	3,067,217,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	417,621,000	382,621,000	35,000,000	9.15
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,038,043,099)	(1,905,184,674)	(132,858,425)	6.97
JUMLAH ASET TETAP	3,071,983,376	2,741,782,301	330,201,075	12.04
JUMLAH ASET	3,072,326,376	2,742,222,301	330,104,075	12.04

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,072,326,376	2,742,222,301	330,104,075	12.04
JUMLAH EKUITAS	3,072,326,376	2,742,222,301	330,104,075	12.04
JUMLAH EKUITAS	3,072,326,376	2,742,222,301	330,104,075	12.04
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,072,326,376	2,742,222,301	330,104,075	12.04

Keterangan :
FINAL

SUNGAYANG, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


RIKA MARIA
198107072005012005.198107072005012005

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (299847) MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 TANAH DATAR

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 3:36 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	2,742,222,301	2,869,588,939	(127,366,638)	(4.44)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(755,909,928)	(777,480,838)	21,570,910	(2.77)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	25,221,300	0	25,221,300	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	30,897,300	0	30,897,300	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(5,676,000)	0	(5,676,000)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,060,792,703	650,114,200	410,678,503	63.17
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	330,104,075	(127,366,638)	457,470,713	(359.18)
EKUITAS AKHIR	3,072,326,376	2,742,222,301	330,104,075	12.04

Keterangan :

FINAL

SUNGAYANG, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

RIKA MARIA

198107072005012005

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
ESELON I : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 04
SATUAN KERJA : MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 TANAH DATAR 299847

Tgl Data : 04/05/26 1:43 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 3:36 PM
Halaman : 1
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2025			2024		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
1	2	4	5	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	3,420,000	3,420,000	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	3,420,000	3,420,000	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	3,420,000	3,420,000	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	671,718,000	664,212,703	(7,505,297)	652,218,000	650,114,200	2,103,800
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	572,718,000	565,212,703	(7,505,297)	590,718,000	588,794,200	1,923,800
3. Belanja Modal	99,000,000	99,000,000	0	61,500,000	61,320,000	180,000
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
 ESELON I : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 04
 SATUAN KERJA : MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 TANAH DATAR 299847

Tgl Data : 04/05/26 1:43 PM
 Tgl Cetak : 04/05/26 3:36 PM
 Halaman : 2
 lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
	2	4	5	6	7	8	9	10
1								
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	671,718,000	664,212,703	(7,505,297)	99	652,218,000	650,114,200	2,103,800	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
 FINAL

